

# EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA DESA DAN PENGARUHNYA TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI KABUPATEN ACEH BARAT

Alvia Jihan Sabira<sup>1</sup> Syahril<sup>2</sup> Bukhari<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Teuku Umar  
[alviasafira1107@gmail.com](mailto:alviasafira1107@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar  
[syahril@utu.ac.id](mailto:syahril@utu.ac.id)

<sup>3</sup>TAPM P3MD Aceh Barat  
[clbukhariwb@gmail.com](mailto:clbukhariwb@gmail.com)

*correspondent author: [syahril@utu.ac.id](mailto:syahril@utu.ac.id)*

## **Abstract**

This study aims to determine the effect of DDS and DDN on poverty levels in West Aceh. The data used in this study is secondary data from 2015-2020 sourced from SIPEDE (village development information system) and BPS (central statistical agency). The model used is multiple linear regression with analysis method using OLS (ordinary least square) parameter estimation approach. The results showed that the independent variable DDS (saprass village funds) had a positive and insignificant effect on TKM (poverty level), while the independent variable DDN (non-saprass village funds) had a significant negative effect on TKM (poverty level). The value of the coefficient of determination ( $R^2=0.8106$ ) shows that the poverty rate of West Aceh of 81.06 percent is influenced by DDS and DDN, and more than 18.94 is influenced by other variables outside this research.

Future recommendations for the central government are to increase the Village Fund so that Saprass and Non-Saprass activities are maximized for village development. And prioritize non-Saprass activities in the field of community empowerment and training.

Keywords: DDS, DDN, TKM

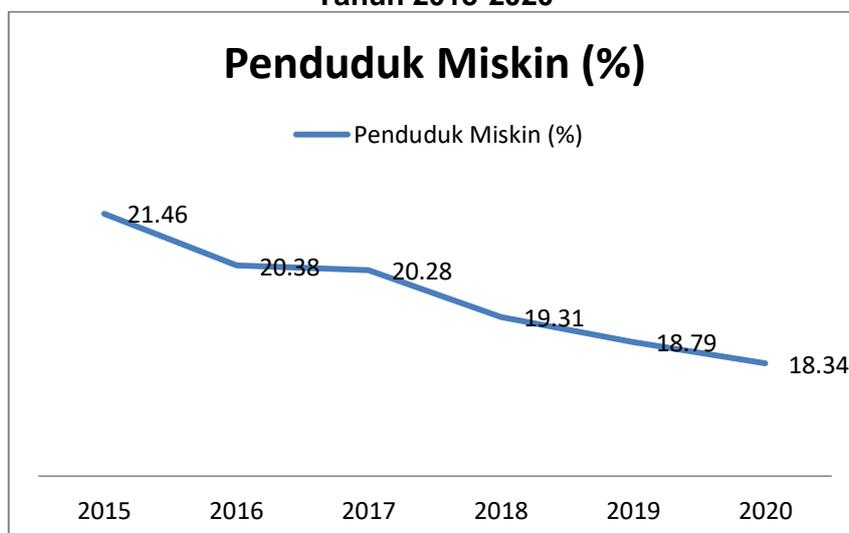
## **PENDAHULUAN**

Belakangan ini, Aceh menjadi sorotan sebagai daerah termiskin di Sumatera dan bahkan di tahun 2021 tingkat kemiskinan Aceh sebesar 15,43 persen. Secara nasional Aceh menempati urutan keenam provinsi termiskin dengan tingkat kemiskinan 15,32 persen (BPS, 20 Desember 2019). Pengamat Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Syah Kuala, Dr Amri SE MSi menyatakan, meningkatnya angka kemiskinan Aceh tahun 2021 terjadi sebab terdapatnya kesalahan manajemen anggaran oleh Pemerintah Aceh yang terjalin semenjak lama. Perihal ini bukan untuk pertama kalinya terjadi di Aceh serta menjadi wilayah termiskin di Sumatera, meskipun anggaran yang diterima oleh aceh sangat besar. (BPS RI, 19 Desember 2019), merilis Aceh termasuk salah satu dengan APBD tertinggi di Indonesia tahun anggaran 2019 dengan jumlah Rp 17,327 triliun, ternyata masih belum mampu mengatasi persoalan utama di Aceh, yaitu tingginya tingkat kemiskinan.

Kemiskinan menjadi penyebab utama masalah terbesar dunia, terutama di berbagai negara berkembang termasuk Indonesia. Kemiskinan sudah menjadi permasalahan lama yang tidak ada habisnya dan tidak akan terlepas dari dalam

kehidupan masyarakat, kemiskinan itu sendiri yang dari dulu hingga sekarang sangat dihindari oleh daerah manapun, oleh karena itu perlu adanya penanganan serius dari pemerintah maupun pihak-pihak terkait. Di Aceh Barat sendiri kemiskinan masih menjadi permasalahan utama, Dinas Sosial Kabupaten Aceh Barat mencatat jumlah penduduk miskin di kabupaten setempat menggapai 19.648 KK (kepala keluarga) dari 57.020 kepala keluarga. Indikator miskin yang digunakan rata-rata dari penghasilan penduduk miskin di bawah 700 hingga 600 ribu rupiah atau dibawah upah UMR. Kepala Bidang Dayasos dan Penanganan Fakir miskin (Teuku Remi Ilham Sahputra), menjelaskan angka tertinggi kemiskinan tercatat di Meureubo dan Johan Pahlawan dikarenakan kedua kecamatan tersebut ialah kecamatan yang sangat banyak penduduknya. Untuk dua kecamatan dengan kemiskinan itu merupakan wilayah pesisir yang kebanyakan berprofesi sebagai nelayan. (Remi, 2019) penanganan kemiskinan di Kabupaten setempat selama ini lewat kegiatan Beras Sejahtera, PKH, program pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam bentuk stimulan ekonomi, rehab rumah bagi rumah tangga miskin, membentuk Kelompok usaha Bersama (KUBE) yang semua program tersebut dilakukan melalui APBN.

**Grafik.1**  
**Penduduk Miskin Kabupaten Aceh Barat**  
**Tahun 2015-2020**



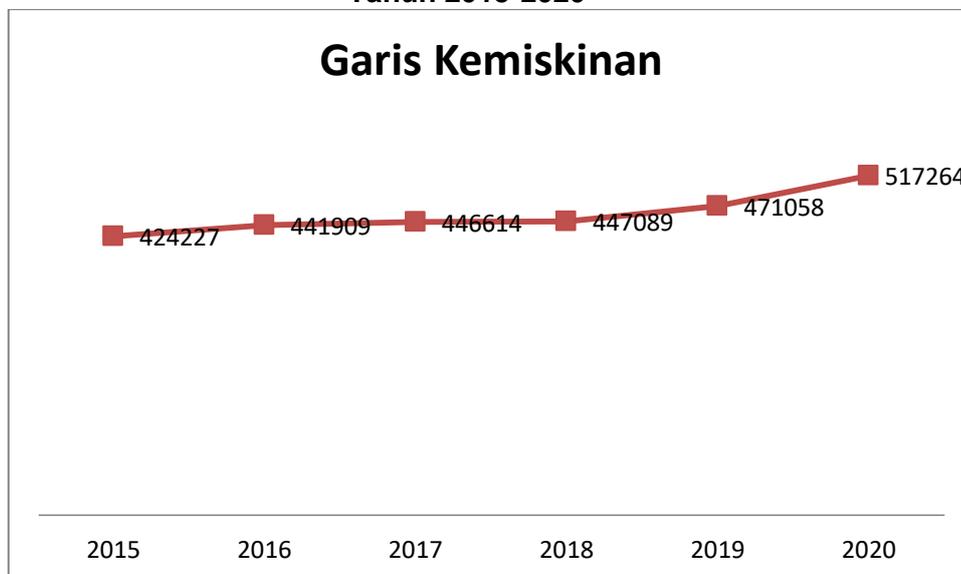
(Sumber: BPS, Aceh Barat 2021)

Penduduk miskin merupakan masyarakat yang tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan awal semacam makanan dan pengeluaran setiap bulannya rata-rata di bawah garis kemiskinan. Menurut Syami (1994), Penduduk miskin kebanyakan terletak pada wilayah pedesaan, akses yang dimiliki terbatas dan kemampuan berusaha minim sehingga membuat mereka sulit untuk maju dan berkembang.

Grafik.1 memperlihatkan data penduduk miskin di Kabupaten Aceh Barat tahun 2015-2020. Di tahun 2015 terlihat banyaknya 21,46% penduduk miskin dari total jumlah penduduk di Aceh Barat. Tahun 2016 turun menjadi 20,38%, sedangkan tahun 2017 turun 0.1 persen menjadi 20,28%, di tahun 2018-2020 semakin menurun presentase penduduk miskinnya. Itu dikarenakan, adanya pembangunan infrastruktur mempermudah akses jalan yang ada di desa, dengan jalan yang bagus maka apapun aktivitas yang ada di desa sudah semakin lancar, misalnya dalam mengirim barang-barang hasil pertanian desa ke kota sudah tidak memerlukan banyak biaya transportasi, begitupun sebaliknya. Tidak hanya di pembangunan fisik, namun dipelatihan-pelatihan ataupun pemberdayaan masyarakat itu bisa membuka wawasan mereka untuk berwirausaha dan pemerintah memberikan dana usaha

kepada mereka dan usaha-usaha yang mereka bangun itu bisa menaikkan pendapatan mereka, bahkan juga bisa sekaligus membuka lapangan pekerjaan. Jadi, trend grafik kemiskinan pun menurun di Kabupaten Aceh barat.

**Grafik.2**  
**Garis Kemiskinan Kabupaten Aceh Barat**  
**Tahun 2015-2020**



(Sumber: BPS, Aceh Barat 2021)

Garis kemiskinan merupakan perhitungan pengeluaran per kapita masyarakat setiap bulannya, jika pengeluaran masyarakat di bawah garis kemiskinan, maka bisa dikatakan mereka masuk kedalam kategori sebagai penduduk miskin. Terlihat grafik di atas standar minimum pengeluaran masyarakat dari tahun ke tahun semakin meningkat, di karenakan banyak masyarakat yang semakin tahun semakin adanya perubahan dengan pekerjaan yang sudah semakin membaik sehingga menaikkan pendapatan dan itu sangat berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan, dimana pengeluaran masyarakat berpengaruh langsung terhadap pendapatan. Kemiskinan itu diakibatkan kondisi yang membuat mereka menjadi miskin yaitu melemahnya ekonomi, tuntutan hidup semacam style hidup yang tidak sesuai pemasukan ataupun kerap membeli benda yang tidak perlu serta budaya yang membuat warga itu jadi miskin minimnya berupaya untuk memperoleh pemasukan bonus, maka sebab itu banyak warga hidup di garis kemiskinan (Astuti, 2012). Kemiskinan di amati dari berapa banyak rupiah yang dikeluarkan dalam mengkonsumsi seseorang tiap perbulannya ataupun tingkatan mengkonsumsi seseorang dengan garis kemiskinan, penduduk miskin ialah warga dengan pengeluaran rata-rata di dasar garis kemiskinan (Kuncoro, 2004).

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sangat membantu perekonomian yang terdapat di desa untuk menanggulangi kemiskinan agar tidak ada lagi kesenjangan antar daerah. (indrawati, 2017) Dikala ini Pemerintah Indonesia lewat nawacita berkomitmen untuk membangun Indonesia dari pinggiran dimana masih sangat minimnya pembangunan di wilayah tersebut, di antara lain dengan meningkatkan pembangunan di desa. Program Dana Desa ini bukan cuma yang awal di Indonesia, tetapi juga yang awal serta terbanyak di segala dunia.

Tujuan dilaksanakan program Dana Desa (landasan Hukum Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 tentang Desa) :

1. Tingkatkan pelayanan publik di desa.
2. Mengentaskan kemiskinan.

3. Memajukan perekonomian desa.
4. Menanggulangi kesenjangan pembangunan antar desa.
5. Memperkuat warga desa selaku subjek dari pembangunan.

Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan pada Desa dan diprioritaskan untuk :

- pelaksanaan pembangunan.
- pemberdayaan masyarakat desa.

Undang-Undang Desa sudah mencantumkan desa menjadi ujung tombak pembangunan serta peningkatan kesejahteraan warga. Desa diberikan kewenangan serta sumber dana yang mencukupi supaya bisa mengoperasikan kemampuan yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi serta kesejahteraan warga. Per tahunnya Pemerintah Pusat sudah mengalokasikan Dana Desa yang lumayan besar buat diberikan kepada Desa. Pada tahun 2015, Dana Desa dianggarkan sebesar Rp20,7 triliun, dengan rata-rata tiap desa memperoleh alokasi sebesar Rp280 juta. Pada tahun 2016, Dana Desa bertambah menjadi Rp46,98 triliun dengan rata-rata tiap desa sebesar Rp 628 juta serta di tahun 2017 kembali bertambah menjadi Rp60 triliun dengan rata-rata tiap desa sebesar Rp 800 juta (Indrawati, 2017).

Dana Desa teruji telah menciptakan fasilitas prasarana yang berguna untuk warga, berbentuk terbangunnya lebih dari 95,2 ribu km jalur Desa, 914 ribu M jembatan, 22.616 unit sambungan air bersih, 2.201 unit perahu, 14.957 unit PAUD, 4.004 unit Polindes, 19.485 unit sumur, 3.106 pasar desa, 103.405 unit drainase serta irigasi, 10.964 unit Posyandu, serta 1.338 unit embung dalam periode 2015-2016 (Indrawati, 2017).

Bersumber pada Peraturan pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Penerapan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, rincian pemakaian Belanja Desa yang diresmikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) digunakan merupakan 30 persen untuk pemerintahan desa yang digunakan sebagai bayaran teratur semacam bayaran pemasukan, tunjangan, operasional, bayaran ekspedisi dinas. Sebaliknya 70 persen penggunaannya untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, penerapan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, serta pemberdayaan warga desa (Setianingsih). Dana Desa ini salah satunya diperuntukkan untuk kegiatan sapsras dan non sapsras, dimana sapsras itu seperti pembangunan fisik dan non sapsras seperti pelatihan-pelatihan dan pemberdayaan masyarakat. Jadi, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas Dana Desa dan pengaruhnya terhadap kemiskinan di kegiatan sapsras dan non sapsras ini.

**Tabel.1**  
**Dana Desa Kegiatan Sapsras Tahun 2017-2020**

<b>Tahun</b>	<b>DD Sapsras Aceh Barat</b>	<b>Realisasi DD Sapsras</b>	<b>Presentase</b>
<b>2017</b>	151,804,608,580	132,580,951,528	87.34%
<b>2018</b>	105,451,601,002	100,903,623,618	95.68%
<b>2019</b>	144,635,172,222	143,353,589,550	99.11%
<b>2020</b>	98,064,561,927	96,804,338,558	98.71%

Pada Tabel.1 di atas bisa kita lihat Dana Desa untuk Sapsras di tahun 2017-2020.

Pada tahun 2017 terlihat bahwasanya dana desa sebesar 151,804,608,580 Milyar di Aceh Barat, bisa kita lihat APBDES dan realisasi tidak sama karena penggunaan dana desa tahun 2017 yang terealisasi sebesar 87.34% (bisa dilihat hasilnya melalui pengurangan APBDES dikurang realisasi) dan sehingga terjadinya SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) yang seharusnya realisasi itu jumlahnya harus sama dengan APBDES, SILPA ini masuk ke anggaran tahun depan (alokasi), dana 2018 ditambah SILPA 2017 menjadi APBDES 2018. Di tahun 2018 kejadian yang sama dengan tahun 2017 bahwasanya terjadi SILPA dikarenakan realisasi tidak mencapai target dengan jumlah APBDES. Di tahun 2019-2020 juga sama dengan tahun

sebelumnya, namun di 2 tahun ini sudah ada peningkatan dimana selisih antara realisasi dan APBDES mulai menipis, itu artinya sudah semakin efektif Anggaran Dana Desa untuk Saprasi (pembangunan fisik) yang ada di desa Kabupaten Aceh Barat.

Note : menghitung presentase

$$\text{Presentase} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Anggaran (menu APBDES)}}$$

**Tabel.2**  
**Dana Desa Kegiatan Non Saprasi Tahun 2017-2020**

Tahun	DD Non Saprasi Aceh Barat	Realisasi DD Non Saprasi	Presentase
2017	92,211,394,318	75,338,279,460	81.7%
2018	125,414,952,523	114,364,503,059	91.19%
2019	109,245,845,146	100,088,659,644	91.62%
2020	160,188,244,993	139,470,393,684	87.07%

Pada **Tabel.2** di atas bisa kita lihat Dana Desa untuk Non Saprasi di tahun 2017-2020. Pada tahun 2017 terlihat bahwasanya dana desa sebesar 92,211,394,318 Milyar di Aceh Barat. Di tahun 2017 bisa kita lihat APBDES dan realisasi tidak sama karena penggunaan dana desa tahun 2017 yang terealisasi sebesar 81.7% (bisa dilihat hasilnya melalui pengurangan APBDES dikurang realisasi) dan sehingga terjadinya SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) yang seharusnya realisasi itu jumlahnya harus sama dengan APBDES, SILPA ini masuk ke anggaran tahun depan (alokasi), dana 2018 ditambah SILPA 2017 menjadi APBDES 2018. Di tahun 2019 kejadian yang sama dengan tahun 2018 bahwasanya terjadi SILPA dikarenakan realisasi tidak mencapai target dengan jumlah APBDES. Di tahun 2019-2020 juga sama dengan tahun sebelumnya, namun di 2 tahun ini sudah ada peningkatan dimana selisih antara realisasi dan APBDES mulai menipis, itu artinya sudah semakin efektif Anggaran Dana Desa untuk Non Saprasi (pemberdayaan atau pelatihan masyarakat) yang ada di desa Kabupaten Aceh Barat.

Note : menghitung presentase

$$\text{Presentase} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Anggaran (menu APBDES)}}$$

Menurut penelitian Arfiansyah (2020) di Jawa Tengah, Dana Desa mempengaruhi negatif terhadap kemiskinan, semakin bertambah dana desa akan menurunkan kemiskinan, itu artinya mempengaruhi negatif yang sesuai dengan teori menandakan dana desa dapat mengurangi kemiskinan sehingga perlu adanya peningkatan dana agar pengaruhnya lebih maksimal. Dan di 11 Kabupaten Provinsi Sulawesi Utara, Dana Desa mempengaruhi negatif dan signifikan terhadap Tingkat kemiskinan (Kawulur et all, 2019). Hasil penelitian Annisa serta Seftarita di Aceh tahun 2019, memperlihatkan variabel dana desa mempunyai pengaruh negatif serta signifikan pada kemiskinan. Hasil penelitian dari Kawulur dan Annisa memperlihatkan dana desa tidak hanya mempengaruhi negatif terhadap kemiskinan, namun juga variabelnya signifikan. Sedangkan penelitian Lalira et all 2018, memperlihatkan Dana Desa serta Alokasi Dana Desa terhadap tingkat kemiskinan bertanda sesuai teori namun tidak signifikan, yang berarti Variabel Dana Desa serta Alokasi Dana Desa tidak mempengaruhi terhadap tingkat kemiskinan di Kecamatan gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. Dana desa sepatutnya digunakan secara tepat dalam bidang pembangunan, pembinaan serta pemberdayaan warga. Pemberian dana desa ialah bentuk dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya

agar berkembang dan tumbuh. Kedudukan pemerintah desa dalam membagikan pelayanan, kesejahteraan warga serta mempercepat pembangunan dan perkembangan daerah-daerah strategis wajib ditingkatkan, sehingga dapat meningkatkan daerah yang masih tertinggal dalam sesuatu sistem daerah pengembangan (Setianingsih). Diharapkan Dana Desa efektif dan berpengaruh untuk menekan angka kemiskinan yang ada di Aceh Barat. Berartinya efektifitas pemakaian Anggaran Dana Desa untuk memastikan segala pencapaian yang terdapat di masing-masing wilayah. Efektifitas sendiri ini mengacu pada target sasaran atas kegiatan-kegiatan yang dibangun oleh Desa. Jika kegiatan tersebut mendekati sasaran maka semakin tinggi efektifitas penggunaan Anggaran Dana Desa. Efektivitas ini diukur oleh kegiatan sarana prasarana dan non-sarana prasarana, berbagai kajian diatas terkait dana desa terhadap tingkatan kemiskinan belum melihat dana desa secara terinci dimana dana desa sapsras dan non sapsras, maka dari peneliti akan melihat lebih dalam mengenai dana desa sapsras dan non sapsras terhadap tingkatan kemiskinan di Aceh Barat.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Dana Desa**

Dana Desa merupakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBN) yang diperuntukkan untuk Desa yang ditransfer lewat Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBD) Kabupaten atau Kota serta diprioritaskan buat penerapan pembangunan serta pemberdayaan warga desa. Dana Desa yang bersumber dari APBN merupakan bentuk pengakuan negeri terhadap kesatuan warga hukum yang berwenang mengendalikan serta mengurus urusan pemerintahan, kepentingan warga setempat bersumber pada inisiatif, hak asal usul (hak yang merupakan warisan yang masih hidup/hukum adat) ataupun hak tradisional. Pasal 72 ayat( 1), pemasukan Desa bersumber dari: Pemasukan Asli Desa, Dana Desa dari APBN, Bagian dari hasil pajak wilayah Kabupaten atau Kota (sangat sedikit 10%), Alokasi Dana Desa, Dorongan keuangan dari APBD Provinsi serta APBD Kabupaten atau Kota, Hibah serta sumbangan dari pihak ketiga, Lain-lain pemasukan Desa yang legal.

Di dalam data SIPEDE (Sistem Informasi Pembangunan Desa), Dana Desa itu dipergunakan untuk kegiatan Sapsras dan Non Sapsras. Kegiatan Sapsras merupakan kegiatan pembangunan fisik seperti pembangunan jalan desa dan sebagainya yang sifatnya bisa langsung di rasakan oleh masyarakat Desa. Begitupun sebaliknya, kegiatan Non Sapsras ini merupakan suatu kegiatan yang sifatnya non fisik, seperti pembinaan, pemberdayaan dan penyelenggaraan. Contoh dari kegiatan Non Sapsras ini adalah kegiatan pelatihan posyandu, kelompok PKK (pemberdayaan kesejahteraan keluarga), kegiatan operasional kantor keuchik dan sebagainya.

### **Efektivitas**

Efektifitas (effectiveness) secara universal bisa dimaksud "melaksanakan suatu yang pas" (Stoner, 1996). Menurut Yuki (1994) efektifitas dimaksud berkaitan dengan tepat tidaknya pemilihan sesuatu sehingga sanggup menggapai target yang di inginkan.

Bagi Cambel J. P, pengukuran efektifitas secara universal serta yang sangat menonjol ialah :

1. Keberhasilan program
2. Keberhasilan sasaran
3. Kepuasan terhadap program
4. Tingkatan input serta output
5. Pencapaian tujuan menyeluruh

Sehingga efektifitas program bisa dijalankan dengan keahlian operasional dalam melakukan program-program kerja yang cocok dengan tujuan yang sudah diresmikan sebelumnya. Dari sebagian penjelasan di atas, bisa disimpulkan bahwa

efektifitas ialah keahlian untuk melakukan aktivitas-aktivitas sesuatu lembaga secara fisik serta non fisik untuk menggapai tujuan dan mencapai keberhasilan optimal.

### **Kemiskinan**

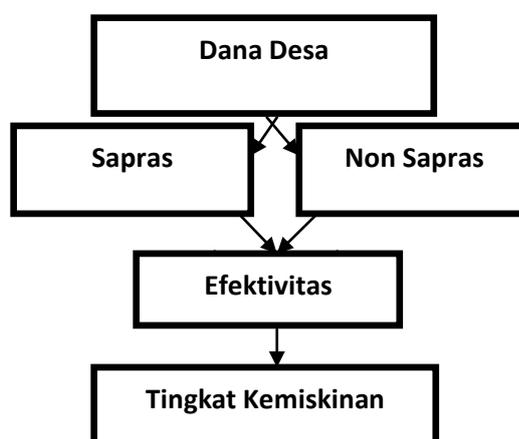
Kemiskinan ialah permasalahan sosial yang terus terdapat di kehidupan masyarakat dan menjadi pokok utama kasus yang tidak akan ada habisnya (Nurwati, 2008). Dan menurut BPS 2016, Kemiskinan ini sendiri merupakan ketidaksanggupan dari sisi ekonomi, materi serta fisik untuk memadai kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan seperti sandang serta papan yang di ukur dengan pengeluaran. Menurut Badan Pusat Statistik, melalui basic needs approach mengukur kemiskinan yaitu dengan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Seperti makanan, baju, tempat berlindung, pembelajaran, serta kesehatan.“ Kemiskinan ialah keadaan kehabisan (deprivation) terhadap sumber-sumber pemenuh kebutuhan dasar yang berbentuk pangan, sandang, papan, pembelajaran serta kesehatan dan hidupnya serba kekurangan Usman 2003 dalam (Inayatsyah, 2019)”.

### **Garis Kemiskinan**

Bank dunia membantu Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengukur kemiskinan bersumber pada pemasukan seseorang. Garis kemiskinan ialah penjumlahan dari garis kemiskinan makanan serta garis kemiskinan non makanan. Penduduk yang mempunyai rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dikategorikan selaku penduduk miskin. Kemiskinan dengan pendekatan pemasukan ataupun pemasukan yang diakibatkan seorang tidak sanggup memenuhi standar minimum pemasukan yang sudah diresmikan (Putra, 2018) serta Munandar dalam (Cica et. all, 2016) mengemukakan bahwa kemiskinan merupakan minimnya pemasukan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok, mereka dikatakan dibawah garis kemiskinan apabila pemasukan tidak cukup buat penuhi kebutuhan pokok semacam pangan, baju, serta tempat berteduh.

### **Kerangka pemikiran**

Berdasarkan teori di atas lahirlah sebuah kerangka pemikiran yaitu :



**Gambar.1.Kerangka Pemikiran**

Dana desa terbagi atas Saprasi dan Non saprasi, dari sisi keduanya ingin melihat efektifitas atau tidaknya dana desa tersebut pada saprasi dan non saprasi, dan juga dari efektifitas itu sendiri bagaimana dana desa berpengaruh langsung di bidang kegiatan saprasi dan non saprasi terhadap tingkat kemiskinan.

### **METODELOGI PENELITIAN**

Penelitian dilakukan di Kabupaten Aceh Barat buat menganalisis efektifitas pengelolaan Dana Desa (Data Dana Saprasi dan Dana Non Saprasi) dan kemiskinan

dalam tahun 2015-2020, dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari kantor Dinas P3MD dan BPS.

Kajian menggunakan 2 model analisis yaitu analisis efektifitas dan analisis pengaruh dana desa terhadap tingkat kemiskinan.

1. Efektifitas

Mahmudi (2015) Sesuatu organisasi program ataupun aktivitas dikatakan efektif apabila output yang dilaksanakan dapat memenuhi sasaran yang diharapkan, misalnya dalam perihal ini aktivitas kegiatan acara organisasi terimplementasikan dengan baik sehingga yang ikut ambil alih merasakan kepuasan.

Untuk menganalisis efektifitas keuangan dilihat dari perbandingan antara realisasi dengan sasaran seperti berikut.

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Dana Desa}}{\text{Target Dana Desa}} \times 100$$

Efektifitas bersumber pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang keuangan serta kinerja pemerintah dapat diketahui efektifitas atau tidaknya dapat dilihat dari kriteria dibawah ini.

**Tabel.3 Kriteria Mengukur Efektifitas Pelaksanaan Pengelolaan DD**

Presentase kinerja Keuangan	Kriteria
≥ 100	Sangat Efektif
90 – 100 %	Efektif
80 – 90 %	Cukup Efektif
60 – 80 %	Kurang Efektif
< 60 %	Tidak Efektif

Sumber: Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006

2. Regresi Linier Berganda

Untuk mencari hubungan antara variabel Independen (X) yaitu Dana Desa Saprass dan Dana Desa Non Saprass terhadap variabel dependen (Y) yaitu Kemiskinan. Di mana variabel independen sangat mempengaruhi terjadinya perubahan pada variabel dependen. Model analisi regresi linier berganda seperti di bawah ini.

$$\text{TKM} = f(\text{DDS} + \text{DDN})$$

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon \dots\dots\dots (1)$$

Di transformasikan menjadi :

$$\text{TKM} = \alpha + \beta_1 \text{DDS} + \beta_2 \text{DDN} + \varepsilon \dots\dots\dots (2)$$

Dimana,

TKM : Variabel Terikat

DDS : Dana Desa Saprass

DDN : Dana Desa Non Saprass

$\alpha$  : Konstanta

$\beta_1 \beta_2$  : Koefisien Regresi

$\varepsilon$  : Kesalahan Pengganggu (*error term*)

**Uji Asumsi Klasik**

1. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2013) Uji normalitas bertujuan mengetahui apakah masing-masing variabel berdistribusi normal ataupun tidak, untuk menguji apakah data berdistribusi normal ataupun tidak itu dicoba uji statistic Kolmogrov-Smirnov Test. Residual berdistribusi normal bila mempunyai nilai signifikan 0,05.

## 2. Uji Multikolinieritas

Imam Ghozali (2013) uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemui terdapatnya korelasi antar variabel bebas (independen) ataupun variabel bebas tersebut mempunyai permasalahan multikorelasi ataupun tidak.

Metode mengetahui terdapatnya multikolinieritas dalam model regresi :

- Besarnya Variance Inflation Factor (VIF), pedoman sesuatu model regresi yang bebas multikolinieritas ialah nilai  $VIF \leq 10$ .
- Besarnya Tolerance pedoman sesuatu model regresi yang bebas multikolinieritas ialah nilai Tolerance  $\geq 0,1$ .

## 3. Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2013) uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode-t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Metode Durbin-Watson dan tata cara Breusch-Godfrey ialah 2 tata cara digunakan untuk menguji autokorelasi yang merupakan kendala pada fungsi yang berbentuk korelasi di antara variabel error.

## 4. Uji Heteroskedastisitas

Bagi Imam Ghozali (2013) uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan/variance dari residual satu pengamatan kepengamatan yang lain.

### **Uji T (parsial)**

Menurut Ghozali (2013) uji statistik t pada dasarnya membuktikan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen (variabel bebas) secara individual dalam menerangkan variabel dependen (variabel terikat). Kriteria pengujian untuk mengetahui diterima ataupun ditolaknya hipotesis yakni dimana  $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$  ataupun signifikan  $> 0.05$ .  $H_0$  ditolak serta  $H_a$  diterima, artinya variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Dan kebalikannya jika  $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$  atau  $< 0.05$ .  $H_0$  diterima serta  $H_a$  ditolak, maksudnya variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

### **Uji F (uji simultan)**

Bagi Ghozali (2013) Uji F digunakan untuk menunjukan apakah seluruh variabel independen (variabel bebas) yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama ataupun simultan terhadap variabel dependen (variabel terikat). Kriteria pengujian untuk mengetahui diterima ataupun ditolaknya hipotesis yakni dimana  $F \text{ hitung} < F \text{ tabel}$  ataupun signifikan  $> 0.05$ .  $H_0$  diterima, maksudnya variabel independen secara serentak ataupun bertepatan tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Serta kebalikannya bila  $F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$  ataupun signifikan  $< 0.05$ .  $H_0$  ditolak, artinya variabel independen secara serentak ataupun bertepatan mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

### **Koefisien Korelasi (R)**

Bilangan yang menyatakan kekuatan ikatan antara 2 variabel ataupun lebih, ataupun pula bisa memastikan arah dari kedua variabel yang berarti ikatan seberapa kuat antara variabel X serta variabel Y (Siregar, 2015).

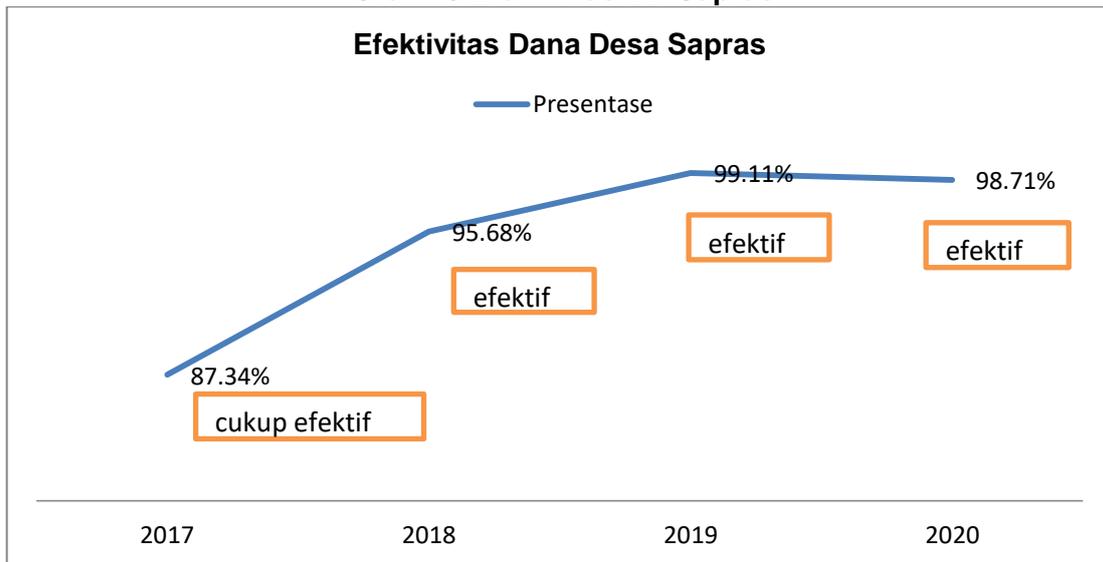
### **Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Menurut Misbahuddin dan Hasan (2013) Koefisien Determinasi (KD) merupakan angka ataupun indeks yang digunakan buat mengenali besarnya sumbangan suatu variabel ataupun lebih (variabel bebas, X) terhadap variasi (naik atau turunnya) variabel yang lain (variabel terikat, Y) yang berarti seberapa besar persen variabel X mempengaruhi variabel Y, sisanya di pengaruhi variabel lain.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

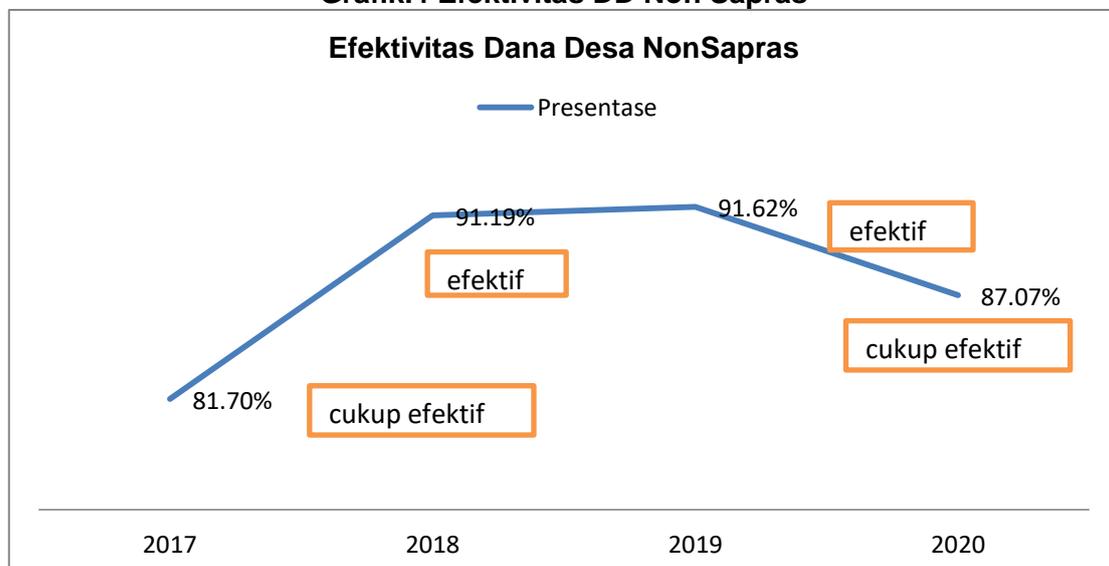
### Efektivitas Dana Desa Aceh Barat

#### Grafik.3 Efektivitas DD Saprass



Pada grafik di atas bahwasanya capaian efektifitas Dana Desa Saprass di Aceh Barat sudah semakin efektif dari tahun ke tahun. Capaian tersebut terbukti dengan berjalannya kegiatan Saprass di beberapa bidang yaitu Sarana prasarana Desa, Sarana prasarana Ekonomi, Sarana prasarana lainnya, Sarana prasarana lingkungan, dan Sarana prasarana pelayanan sosial dasar. Bentuk dari kegiatannya bersifat fisik yang sudah terbangun seperti gedung sekolah TK/PAUD, jalan poros desa, jembatan roda 4, bangunan irigasi, jalan akses lahan, jalan poros dusun, saluran pembuangan, jalan setapak, jalan lingkungan, bahu jalan, tambatan perahu sungai, tembok penahan tanah, pasar umum, lumbung padi, gedung BUMDES, tempat pengolahan sampah, bak sampah, bangunan air bersih, jaringan kabel listrik, MCK (mandi, cuci, kakus), sumur bor, posyandu, PMA (perlindungan mata air, perpipaan), dan masih banyak lagi sarana prasarana lainnya yang sudah terbangun di Gampong sejak adanya Dana Desa.

#### Grafik.4 Efektivitas DD Non Saprass



Pada grafik di atas terlihat bahwasanya capaian efektivitas Dana Desa Non Saprasi di Aceh Barat sudah semakin efektif. Capaian tersebut terbukti dengan berjalannya kegiatan Non Saprasi di beberapa bidang yaitu Non Sarana prasarana pemberdayaan masyarakat, pembinaan kemasyarakatan, penyelenggaraan, dan penanggulangan bencana. Bentuk dari kegiatannya seperti kenaikan mutu proses perencanaan desa, pendukung aktivitas ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDes ataupun oleh kelompok usaha warga desa yang lain, pembelajaran, pelatihan, penyuluhan untuk (kepala desa, fitur desa, serta tubuh permusyawaratan desa), penyelenggaraan promosi kesehatan serta gerakan hidup bersih serta sehat, dan kenaikan kapasitas kelompok. Serta pembinaan lembaga kemasyarakatan, pengadaan sarana prasarana berolahraga, pembinaan kerukunan umat beragama, pembinaan kesenian serta sosial warga, belanja pegawai, operasional petugas, operasional perkantoran, dan hal lainnya penanggulangan bencana dan bantuan langsung tunai (BLT).

### Hasil Regresi Linier Berganda Dana Desa Saprasi dan Non Saprasi terhadap Tingkat kemiskinan

**Tabel**  
**Hasil Estimasi Regresi Dana Desa Saprasi dan Non Saprasi Terhadap Tingkat Kemiskinan**

Dependent Variable: Y  
Method: Least Squares  
Date: 06/15/21 Time: 23:36  
Sample: 2015 2020  
Included observations: 6

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	21.06940	0.531701	39.62643	0.0000
DDS	1.74E-12	7.58E-12	0.229870	0.8330
DDN	-1.76E-11	6.90E-12	-2.546962	0.0842
R-squared	0.810627	Mean dependent var	19.76000	
Adjusted R-squared	0.684378	S.D. dependent var	1.157981	
S.E. of regression	0.650556	Akaike info criterion	2.284875	
Sum squared resid	1.269670	Schwarz criterion	2.180754	
Log likelihood	-3.854624	Hannan-Quinn criter.	1.868073	
F-statistic	6.420877	Durbin-Watson stat	2.667810	
Prob(F-statistic)	0.082409			

Sumber: Data Sekunder (diolah 2021)

$$TKM = 21.0694 + 1.74E-12 (DDS) - 1.76E-11 (DDN) + \epsilon$$

Berdasarkan pada persamaan tersebut dipaparkan dibawah ini :

1. Nilai konstanta sebesar 21.0694, jika DDS dan DDN diasumsikan sama dengan satu persen ataupun konstan, maka TKM akan mengalami pergantian sebesar 21 persen dari nilai TKM.
2. Koefisien regresi DDS sebesar 1.74, bearti setiap kenaikan DDS sebesar satu persen maka akan meningkatkan kemiskinan 1 persen, itu artinya DDS berpengaruh positif namun tidak signifikan dan tidak sesuai dengan teori.
3. Koefisien regresi DDN sebesar -1.76, bearti setiap kenaikan DDN sebesar satu persen maka akan menurunkan kemiskinan 1 persen, itu artinya DDN berpengaruh negatif signifikan dan sesuai dengan teori.

## Uji Kesesuaian

- a. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )  
Hasil pengolahan data bahwa koefisien determinasi sebesar 0.8106, berarti keragaman variabel independen secara bersamaan memberi penjelasan terkait variabel dependen sebesar 81.06 persen dan lebihnya 18.94 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model.
- b. Uji t-Statistik (uji parsial)
  1. DDS, yaitu nilai t hitung  $>$  t tabel ( $0.23 < 1.75$ ) ataupun signifikan  $>$  alfa 10% yaitu  $0,8330 > 0,10$ , berarti DDS memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap tingkatan kemiskinan.
  2. DDN, yaitu nilai t hitung  $>$  t tabel ( $-2.55 > 1.75$ ) ataupun signifikan  $<$  alfa 10% yaitu  $0,08 < 0,10$ , berarti DDN memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkatan kemiskinan.
- c. Uji f-Statistik (uji simultan)  
Uji f memperlihatkan bahwa variabel DDS serta DDN secara simultan mempengaruhi variabel Tingkat Kemiskinan pada tingkatan kebenaran 90 persen sedangkan tingkat kesalahan 10 persen, hasil uji F menampilkan bahwa f hitung  $>$  f tabel ataupun  $6,42 > 3.68$ , itu artinya variabel DDS dan DDN berpengaruh terhadap TKM.

## Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas mempunyai nilai probability sebesar  $0.7141 > 0.05$  dimana tingkat kesalahan 5% yang berarti data berdistribusi normal.
  2. Uji Multikolinieritas VIF 2.267074 lebih kecil dari 10 maka tidak terjadi multikolinieritas.
  3. Uji Autokorelasi nilai Prob. Chi- Square(2) lebih besar dari 0.05 atau  $0.0894 > 0.05$  maka tidak terjadi autokorelasi.
  4. Uji Heteroskedastisitas nilai Prob. Chi- Square(2) lebih besar dari 0.05 ataupun  $0.0604 > 0.05$  maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
- Dari hasil uji asumsi klasik bahwa regresi telah bersifat BLUE (Best Linear Unbiased Estimator) yang artinya dimana ke 4 uji di atas telah dikatakan lulus bahwa persamaan regresi yang didapatkan mempunyai ketepatan dalam estimasi (ditaksir), tidak bias dan konsisten (tidak berubah-ubah).

Hubungan antara DDS dan DDN terhadap Tingkatan Kemiskinan Aceh Barat keduanya secara simultan berpengaruh terhadap tingkatan kemiskinan. Akan tetapi, secara parsial yang berpengaruh hanya DDN, meskipun sudah menunjukkan pengaruh yang signifikan dana desa belum berkontribusi besar terhadap penyusutan kemiskinan di suatu kabupaten kota, perihal ini bisa diakibatkan pengelolaan dana desa belum mampu meningkatkan pemberdayaan warga secara totalitas (keseluruhan), secara normatif (cocok dengan konsep) serta administratif (daerah) pengelolaan alokasi dana desa dicoba dengan baik, tetapi secara substansi masih belum memegang arti pemberdayaan yang sebetulnya ialah belum tepat dengan inti ataupun pokok dari tujuan pembangunan dana desa (Putra, 2018). Tidak hanya itu, sebagian stakeholders juga belum melakukan kedudukannya secara optimal (Karimah, Saleh, & Wanusmawatie, 2005), serta DDS tidak mempengaruhi itu sebab, menurut Kuznet dalam (Todaro, 2000) dan Jhingan (2010), menerangkan perkembangan ekonomi sebagai peningkatan jangka panjang dalam kemampuan suatu negeri menyediakan menjadi banyak tipe beberapa barang ekonomi kepada penduduknya. Pada sesi dini perkembangan ekonomi ada trade off pemerataan pemasukan. Kuznet meningkatkan kalau perkembangan ekonomi di negeri (wilayah) berkembang pada awal mulanya cenderung menimbulkan tingginya ketidakmerataan (ketimpangan pemasukan) antara orang miskin serta kaya. Apabila negara (wilayah)

berkembang tersebut terus menjadi maju, hingga permasalahan ketimpangan hendak menyusut sebab akses mendapatkan beberapa barang ekonomi gampang didapatkan siklus bisnis bisa berjalan dengan baik. Sehingga perkembangan histori di negara-negara maju mengemukakan jikalau pada sesi dini perkembangan ekonomi dalam distribusi pemasukan cenderung memburuk, namun pada tahap berikutnya dalam distribusi pendapatannya hendak membaik. Jadi, setiap pengeluaran atau investasi pemerintah di daerah berkembang tidak selalu berdampak langsung kepada pendapatan masyarakat yang dapat menurunkan TKM karena butuh waktu untuk memberikan dampak kepada masyarakat. Terutama di daerah masyarakat dengan SDM yang tidak baik, sebegus apapun sarana prasarana dan infrastruktur, bila masyarakat desa tidak bisa memanfaatkan dengan baik maka tidak bisa berkontribusi kependapatan yang meningkat sehingga tidak tergolong masyarakat miskin lagi, jika sudah dititik SDM sudah mampu memanfaatkan fasilitas maka sarana prasarana akan berdampak kepada pendapatan masyarakat.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Bersumber pada hasil riset serta ulasan bisa di tarik kesimpulan :

1. Efektifitas penggunaan Dana Desa Saprasi dan Dana Desa Non Saprasi Aceh Barat terlihat sudah semakin efektif dengan terbuक्तinya sudah banyak pembangunan-pembangunan yang terlaksana semenjak adanya Dana Desa ini.
2. Tingkat kemiskinan (TKM) Aceh Barat dipengaruhi 81.06 persen oleh Dana desa sapras (DDS) dan Dana desa non sapras (DDN), sedangkan sisanya 18.94 persen dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.
3. DDS berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap TKM Aceh Barat. Itu artinya DDS tidak berpengaruh terhadap TKM, padahal jika dilihat dari tingkat efektif, DDS efektif penggunaan dananya. Akan tetapi, dari tabel efektifitas DDS terlihat bahwasanya DDS setiap tahunnya mengalami fluktuasi naik turunnya Dana, itu menjadi salah satu penyebab Saprasi tidak berpengaruh terhadap TKM. Dan Tidak semua pembangunan yang terlaksana itu tepat sasaran atau tidak berdampak langsung terhadap pendapatan masyarakat, maka dari itu kemiskinan pun meningkat. Dan juga karena Dana Desa ini masih terbilang baru terlaksana di tahun 2015, maka dari itu belum maksimal manfaatnya karena masih terlalu muda. Perlu adanya perhatian khusus pemerintah dan partisipasi masyarakat untuk memaksimalkan Dana Desa secara baik dan berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat sehingga TKM pun menurun.
4. DDN berpengaruh negatif dan signifikan terhadap TKM Aceh Barat. Itu artinya DDN berpengaruh terhadap TKM.

Bersumber pada hasil riset penulis bisa membagikan anjuran ataupun saran, yaitu :

1. Rekomendasi kedepan untuk pemerintah pusat lebih di tingkatkan lagi Dana Desa supaya kegiatan Saprasi dan Non Saprasi lebih maksimal untuk pembangunan Desa.
2. Pemerintah desa juga perlu perhatian khususnya memaksimalkan dana desa Aceh Barat seperti memberikan pelatihan kepada para pelaksana terkait dengan pengelolaan dana desa agar manfaatnya bisa sama-sama dirasakan oleh masyarakat desa. Dikarenakan dana desa masih tergolong baru terlaksana tahun 2015, itu salah satu permasalahan kenapa DDS tidak berpengaruh dan DDN pun pengaruhnya kecil terhadap TKM. Kegiatan DDS harus sesuai dengan tujuan pembangunan Desa, serta lebih mengedepankan kegiatan Non Saprasi di bidang pemberdayaan dan pelatihan masyarakat.
3. Diharapkan untuk kepala Desa di masing-masing desa kabupaten Aceh Barat, untuk lebih mengedepankan penggunaan Dana Desa tepat sasaran

- dan tepat waktu sehingga pelaksanaan kegiatan yang ada di desa bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan masing-masing kebutuhan desa.
4. Peran masyarakat juga sangat penting dalam menurunkan TKM di kegiatan Saprass dan Non Saprass dengan ikut berpartisipasi di pelatihan, pemberdayaan, dan sebagainya yang sifatnya untuk merubah atau menaikkan pendapatan masyarakat sehingga TKM pun menurun.
  5. Untuk peneliti selanjutnya, dianjurkan menambah variabel lain dan menggunakan sample lebih banyak juga serta menggunakan model yang lebih bagus, agar hasil penelitiannya jauh lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Annisa dan Seftarita. 2019. Pengaruh Dana Desa Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Aceh. (4) 4. ISSN.2549-8363. Jurnal Ilmiah Mahasiswa.
- Arfiansyah, Mufti Arief. 2020. Dampak Dana Desa Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Jawa Tengah, (1) 1.
- Badan Pusat Statistik (BPS). Berbagai Edisi. Statistik Indonesia, Jakarta.
- Cica et all. (2016). Studi Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan Masyarakat Desa Lohia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna, (1) 1. E-IISN,2503-1937. h,106-118
- Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Indrawati. (2017). Dana Desa. Kementerian keuangan republik indonesia. Jakarta.
- Inayatsyah, Bismi Dan Zulham, Teuku. 2019. Evaluasi Dan Efektifitas Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pengurangan Kemiskinan Di Kabupaten Bener Meriah, (4) 2. ISSN.2549-8363. 175-183.
- Jhingan, M.L. (2000). Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, Terjemahan D. Guritno. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kuncoro, Mudrajad. (2004). Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang. Jakarta: Erlangga.
- Karimah, Faizatul, Saleh, Choirul dan Wanusmawatie, Ike.(2005) Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 4, Hal. 597-602.
- Kawulur et all, (2019). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Desa Dalam Menurunkan Tingkat Kemiskinan Di 11 Kabupaten Provinsi Sulawesi Utara, (19) 3. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi.
- Lalira et all. (2018). Pengaruh Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. Vol 18, No 4. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi.
- Misbahudin, Iqbal Hasan, (2013), Analisis Data Penelitian Dengan Statistik, Jakarta, Bumi Aksara.
- Nunung Nurwati. 2008. "Kemiskinan : Model Pengukuran, Permasalahan dan Alternatif Kebijakan". Jurnal Kependudukan Padjadjaran, Vol. 10, No. 1, Januari 2008 : 1 – 11.
- Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006. Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Putra, Heru Syah. (2018). Pengaruh Dana Desa Terhadap Kemiskinan Di Aceh. Jurnal Analisis Kebijakan. Vol. 2 No. 2 Tahun 2018. pp.51-61.
- Setianingsih. Kontribusi Dana Desa Dalam Menurunkan Angka Kemiskinan Di Kabupaten Melawi.
- Stoner, A.F. James, DKK, 1996, Manajemen, Edisi Indonesia, Penerbit PT. Prenhallindo, Jakarta.
- Siregar . 2015. Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta: Prenadamedia Group.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Yuki, G (1994). Kepemimpinan dalam Organisasi, terj. Jusuf Udaya, Prehalindo.  
Jakarta 1994.